

ANALISIS KONFLIK ANTARA PEDAGANG PASAR ATAS DENGAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI PASCA KEBAKARAN TAHUN 2017

Irvan Afrinaldo

Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas

Irvannaldo5@gmail.com

Abstrak

Pembangunan di Kota Bukittinggi memang berjalan lancar, namun seperti pembangunan di kota lain, terkadang ada perselisihan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik. Pembangunan Pasar Atas pasca kebakaran tahun 2017 tidak terlepas dari konflik. Munculnya konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menyikapi sesuatu. Penyebabnya umumnya karena adanya tuntutan yang datang dari pedagang terhadap pemerintah dengan alasan pemerintah membuat keputusan yang terkesan sepihak dan membeberkan konflik yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi yang terjadi pasca kebakaran tahun 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik tidak berasal dari para pedagang secara keseluruhan. Para pedagang di sini terbagi menjadi dua pihak, karena ada indikasi ketertarikan pada mereka. Secara keseluruhan, para pedagang telah mengajukan tuntutan dan mempertanyakan sejumlah keputusan dari pemerintah kota. Jika dilihat dari intensitas konfliknya, sebagian besar konflik yang menyebar di masyarakat hanya bersumber dari satu pedagang yang mendirikan asosiasi sendiri. Karena konflik yang hanya bersumber dari segelintir pedagang menyebabkan konflik menjadi kurang menonjol dan cenderung tidak dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Konflik, Pedagang Pasar Atas, Pemerintah Kota Bukittinggi.

Abstract

Development in the City of Bukittinggi is indeed in full swing, but like development in other cities, sometimes there are disputes that occur, causing conflict. The development of Pasar Atas after the 2017 fires was inseparable from the conflict. The emergence of conflict is usually caused by differences in views on addressing something. The cause is generally due to demands that have come from traders against the government on the grounds that the government makes decisions that seem one-sided and exposes the existing conflicts. The problem of this research is the conflict between traders and the government of Bukittinggi City that occurred after the fire in 2017. The research found that conflict did not originate with the traders as a whole. The traders here are divided into two parties, because there are indications of interest in them. As a whole, traders have made demands and questioned several decisions from the city government. If we look at the intensity of the conflict, most of the conflicts that have been spreading in the public are originating from only one trader who founded their own association. Because conflicts that only originate from a handful of traders cause conflicts to be less prominent and tend to be unsolvable.

Keywords: Conflict, Market Traders, Bukittinggi City Government.

1. PENDAHULUAN

Konflik merupakan hal yang biasa terjadi di dalam sebuah pembangunan. Seperti halnya pembangunan dan rekonstruksi Pasar Atas di Kota Bukittinggi pasca kebakaran. Selama pembangunan terdapat beberapa hal yang memunculkan adanya permasalahan di antara pedagang lama pasar atas dengan pemerintah kota. Konflik di dalam pembangunan pasar tentu saja sering menimbulkan konflik terutama yang berasal dari pedagang lama dan kecenderungan konflik terjadi karena kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah. Konflik yang terjadi di antara pedagang pasar atas dengan pemerintah kota Bukittinggi sendiri memiliki beberapa indikasi yang dianggap peneliti sebagai hal yang perlu diungkap, yaitu perihal dinamika konflik yang naik turun dan mengenai perjalanan konflik yang dapat dikatakan cukup lama sedari pasca kebakaran tahun 2017 silam. Konflik sendiri merupakan sebuah esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang memiliki karakter beragam. Perbedaan yang ada menyebabkan konflik menjadi hal yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, serta konflik tidak dapat dihindarkan. Konflik bisa terjadi di antara individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok lain, ataupun antara individu dengan kelompok. Apabila setiap pihak masih memegang teguh pada pandangannya yang bertentangan, kemudian menarik kesimpulan yang berbeda dan kecenderungan untuk bersikap tidak toleran, maka dapat dipastikan akan terjadi konflik.

Pelaksanaan sebuah keputusan politik yang dilakukan dengan efisien juga dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan ini berupa bentuk aspirasi serta pola-pola konflik dan pola hubungan kerja sama. Berbagai bentuk kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi dengan sebuah keputusan politik, namun pemenuhan aspirasi juga akan memunculkan kebutuhan baru serta harapan-harapan baru. Namun kelompok atau anggota masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau tidak diuntungkan dengan sebuah kebijakan, maka mereka akan merasa dirugikan dan tidak diuntungkan sama sekali dengan kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan, dan tentunya mereka akan mencoba mempengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakan yang ada dan mencoba membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Melihat seperti kasus pembangunan ulang Pasar Atas Bukittinggi pasca kebakaran yang melanda tahun 2017 silam. Kebakaran yang terjadi pada Senin pagi tanggal 30 Oktober 2017 telah menghancurkan sebanyak 800 kios yang dimiliki oleh 763 pedagang. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp,-1,5 Triliun Rupiah. Sepanjang pembangunan dan rekonstruksi, banyak isu-isu yang dapat memunculkan terjadinya konflik. Seperti pedagang pemegang kartu kuning yang tidak berhak akan kios yang baru. Semua akan dimulai dari awal dengan sistem sewa untuk semua warga Bukittinggi, dan banyak isu lainnya. Jangankan saat proses pembangunan, sejak pasar tersebut mengalami kebakaran saja sudah memunculkan konflik di dalam masyarakat karena munculnya persepsi masyarakat yang saat itu berpandangan bahwa kejadian itu adalah hal yang sudah direncanakan. Yang menjadi kekecewaan dari pedagang yaitu, setiap adanya keputusan

yang dibuat dan ditentukan oleh pemerintah kota tidak pernah melibatkan mereka sebagai pemilik toko yang dimana mereka dianggap juga memiliki hak ikut serta didalam pengambilan keputusan. Mereka merasa dibodohi dan seperti dijebak oleh pemerintah mereka sendiri. Pedagang menganggap pemerintah kota sangat arogan akan hal yang terjadi.

Terlepas dari perjalanan konflik yang panjang dan berdinamika, peneliti melihat adanya didalam perjalanan konflik yang dimana konflik terjadi memiliki pasang surut. Pasang surut konflik bisa saja datang dari masing-masing pihak yang berkonflik. Seperti contoh kurangnya intensitas tuntutan dari pedagang terhadap pemerintah, ataupun adanya penyelesaian dari pihak pemerintah yang dianggap sebagai penyebab munculnya konflik karena kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pada penelitian ini dilihat dari perjalanan konflik memungkinkan adanya beberapa penyelesaian dari pemerintah itu sendiri, namun penyelesaian tersebut tidak begitu serius atau tidak bisa diterima oleh pedagang sehingga memunculkan tuntutan kembali dan meningkatkan intensitas konflik kembali. Jadi pada konteks ini, intensitas konflik bisa berubah ketika adanya pengelolaan konflik yang dilakukan. Akan tetapi semua bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan belum tentu bisa mengarahkan konflik ke tahap penyelesaian. Berdasarkan penjelasan yang ada, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai konflik yang terjadi. Maka munculah rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanatahapan konflik serta pengelolaan konflik yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah kota di dalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi pasca kebakaran yang melanda tahun 2017?. Maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui secara detail mengenai konflik yang terjadi diantara pedagang dengan pemerintah kota dalam pembangunan Pasar Atas bukittinggi pasca kebakaran.

Tahapan Konflik

Simon Fisher, menyampaikan beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah tahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini antara lain:

- a) Pra-konflik, merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik.
- b) Konfrontasi, pada saat konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
- c) Krisis, ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang di mana ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal di antara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.
- d) Akibat, kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang memiliki otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.
- e) Pasca-konflik. akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka

saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahapan ini sering kembali menjadi situasi pra konflik.

Pengelolaan Konflik

Pengelolaan konflik di dalam konteks negara demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi dilihat sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Kemudian menurut Simon Fisher dalam mengelola konflik secara langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan Intervensi, Mengidentifikasi, memilih dan mengubah pendekatan terhadap konflik.
- b. Tahap meningkatkan dan mobilisasi untuk mendukung perubahan,
- c. Tahap Pencegahan,
- d. Tahap Mempertahankan Kehadiran,
- e. Memungkinkan suatu penyelesaian

Peneliti di sini juga menggunakan teori pengelolaan dari Simon Fisher. Di awal peneliti telah menggunakan teori tahapan konflik dari Simon Fisher dan di sini peneliti menambahkan teori pengelolaan konflik karena dengan teori ini, peneliti akan menggunakan untuk acuan melihat dinamika dari konflik yang terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari sebuah fenomena sosial dengan tujuan untuk menjelaskan serta menganalisis perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti melihat masalah tersebut (Lexy J. Moleong). Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi karena konflik yang memang terjadi di lingkup Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dilakukan sedari bulan Mei sampai bulan Juli. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan *Purposive sampling*, yaitu merupakan teknik penentuan informan yang dimana sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang sudah dijabarkan oleh peneliti. Dalam penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari beberapa dokumentasi yang didapat peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor dalam Konflik

Dalam konflik sering ditemui aktor-aktor yang menjadi pemain di dalam konflik yang sedang berlangsung. Jika kita membahas mengenai konflik secara menyeluruh, terkadang bukan hanya aktor yang berkonflik satu sama lain namun kita juga dapat menemukan adanya aktor lain yang ikut terseret ke dalam konflik. Aktor lain ini bisa dikatakan sebagai penyebab munculnya permasalahan, pihak yang memiliki interest di dalam konflik. Secara keseluruhan dapat disebutkan aktor-aktor yang berada di dalam konflik ini adalah Pedagang terutama pihak Perhimpunan, pedagang pihak P4B, Pemerintah kota secara spesifik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Sedangkan aktor lainnya yang bisa dikatakan terlibat di dalam konflik sebagai penengah atau pihak yang dapat dikatakan untuk membantu menyelesaikan konflik adalah DPRD Kota Bukittinggi, Komnas HAM. Selanjutnya pihak yang pernah mendapatkan pengaduan seperti OMBUDSMAN, DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPR, Kementrian PUPR, Kemenkumham, Mahkamah Agung, bahkan surat pengaduan kePresiden.

Tahapan Konflik Pedagang dengan Pemerintah Kota Bukittinggi

a. Tahapan Konflik Pra-Konflik

Pra-Konflik merupakan periode di mana terdapat sesuatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Dalam kasus konflik pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi bisa kita gambarkan bahwa konflik terjadi berawal dari keputusan pemerintah pasca terjadinya kebakaran diakhir tahun 2017. Pemerintah disini mengeluarkan keputusan untuk membangun penampungan untuk seluruh pedagang yang menjadi korban kebakaran, namun di dalam keputusan tersebut terdapat hal-hal yang memancing pedagang untuk bersuara dan menuntut ketidaksetujuannya mengenai hal tersebut.

Konflik muncul dikarenakan pedagang saat itu tidak setuju akan keputusan pemerintah mengenai lokasi yang akan dijadikan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Tempat penampungan awalnya akan direncanakan pemerintah dibangun di Jalan Perintis Kemerdekaan hal itu disampaikan pemerintah saat menggelar pertemuan dengan seluruh pedagang. Kemudian pedagang tidak setuju dengan keputusan pemerintah saat itu dan melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk memikirkan kembali tempat yang akan dijadikan TPS, serta pedagang menyuarakan hal ini ke DPRD Kota Bukittinggi. Kemudian DPRD bersama pedagang dan pemerintah kota melakukan pertemuan dan rapat, dan dari hasil pertemuan tersebut akhirnya mendapatkan hasil yang disetujui oleh semua pihak bahwa TPS akan dibangun di halaman parkir Pasar Putih, di belakang Pasar Atas. Dari permasalahan awal yang muncul ternyata dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi antara seluruh pihak saat itu. Jika dilihat dari data yang didapat, maka pada awal konflik muncul sebenarnya sudah ada tindakan mengintensifkan dan

meredam konflik seperti dari pihak DPRD Kota yang mencoba memfasilitasi pertemuan di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik.

b. Tahapan Konflik Konfrontasi

Konfrontasi merupakan saat-saat di mana konflik dapat dikatakan meningkat sehingga konflik dapat diketahui pihak lain dan dapat diketahui oleh publik. Di sini suatu pihak atau kedua belah pihak merasakan adanya masalah, dan kecenderungan akan melakukan perilaku konfrontatif. Mulainya masa-masa konfrontasi dapat dikatakan di saat pemerintah akan merancang dan memulai pembangunan. Tepatnya dapat dilihat di saat pembongkaran bangunan lama pasar atas bekas kebakaran. Di saat itu pihak dari kelompok perhimpunan pemilik toko korban kebakaran melakukan pengaduan kembali ke DPRD kota, yang di mana mereka mengadukan mengenai pemerintah yang dianggap arogan dan tidak mengikutsertakan pedagang yang seharusnya pedagang mengetahui akan mulainya pembangunan pasar. Pedagang merasa tidak dianggap dan hak mereka akan pasar atas hilang.

Konflik dapat dikatakan semakin terbuka karena tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh pihak perhimpunan, apalagi semenjak pihak perhimpunan yang sebelumnya merupakan tim koordinasi telah dibubarkan oleh P4B sehingga pihak perhimpunan lebih bebas melakukan tuntutan apalagi ketika masalah perobohan bangunan dan mereka tidak diajak oleh pemerintah. Konflik yang terjadi ternyata tidak selalu memiliki alur yang stabil..Konflik bisa saja dibayangkan sesuai dengan tahapan konflik jika konflik timbal balik dari satu pihak dengan satu pihak lainnya. Berbeda pada konflik pembangunan pasar atas ini, konflik sendiri terjadi antar dua belah pihak pedagang dengan pemerintah kota. Masing-masing kelompok pedagang bisa saja memiliki permasalahan dan tuntutan yang berbeda sehingga dilihat dari intensitas dan dinamika konflik akan memiliki alur cerita yang sama.

c. Tahapan Konflik Krisis

Tahapan konflik krisis adalah tahapan atau fase di mana konflik berada pada puncak permasalahan. Diakibatkan oleh ketegangan kedua belah pihak dan ada kemungkinan komunikasi yang terputus sehingga hubungan dari kedua belah pihak merenggang. Pada konteks konflik ini, fase krisis dapat dikatakan terjadi ditengah-tengah pembangunan yang di mana kala itu pemerintah kota yang diwakilkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi mengeluarkan surat pemberitahuan mengenai pendaftaran untuk toko baru di pasar atas. Suatu hal yang menyebabkan surat pemberitahuan ini menjadi masalah baru yang justru memperkeruh keadaan, karena pada Point 3 huruf D menyatakan bahwa sistem pemakaian toko pasar atas adalah sistem sewa murni. Perjalanan konflik tentu akan ditemukan satu perihal yang menjadikan konflik tiba pada tingkatan tertinggi. Seperti pada tahapan krisis dalam teori Simon Fisher ini, menjelaskan mengenai satu dan beberapa hal yang menyebabkan konflik akan memunculkan tingkatan yang tinggi.

d. Tahapan Konflik Akibat

Akibat merupakan dampak yang dihasilkan dari konflik yang terjadi. Menurut Simon Fisher di dalam bukunya, konflik bisa menimbulkan beberapa dampak, dampak tersebut dapat berupa suatu pihak yang dapat menaklukkan pihak yang lainnya, ataupun gencatan senjata. Adapun di tahapan konflik ini, akan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat luas ataupun terjadi penurunan tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan serta memungkinkan adanya penyelesaian konflik.

Data-data yang didapat lebih cenderung mengarahkan konflik ini kearah negosiasi, namun data mengatakan intensitas konflik dalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi ini menurun bukan karena adanya jalan keluar yang ditemukan pihak-pihak berkonflik atau dari pihak ketiga. Konflik dikatakan menurun karena adanya tuntutan dari salah satu pihak yang menurun kekuatannya karena permasalahan jumlah dukungan yang didapat. Didalam relitasnya jika didalam konflik salah satu pihak yang memunculkan tuntutan menjadi terpecah dan terbagi karena suatu alasan, maka akan mengakibatkan tuntutan yang diberikan kepada pihak lainnya akan terkesan lemah.

e. Tahapan Konflik Pasca Konflik

Di dalam fase ini pihak yang berkonflik ataupun dengan bantuan pihak ketiga sepakat untuk mengakhiri konfrontasi sehingga konflik bisa dikatakan berakhir. Ketegangan, kekerasan berkurang sehingga keadaan menjadi normal. Namun dalam fase ini bukan berarti konflik selesai sepenuhnya. Perbedaan pendapat dan permasalahan yang ada sebelumnya bisa saja muncul kepermukaan kembali dan bisa dipermasalahkan kembali. Pada konflik di dalam pembangunan Pasar Atas ini belum bisa dikatakan sepenuhnya selesai, terutama yang berkaitan dengan pihak perhimpunan. Seharusnya kita menunggu pasar sampai beroperasi dan memberikan ukuran waktu tertentu. Saat itulah seharusnya kita melihat apakah konflik ini telah berakhir, atau bisa jadi adanya permasalahan atau konflik yang terjadi setelah pasar beroperasi. Semua itu nantinya akan bisa dijadikan penggambaran detail mengenai konflik, Karena konflik bisa saja memiliki dinamika yang berbeda dari alur yang ada.

Pengelolaan Konflik

a. Persiapan Intervensi

Banyaknya isu-isu dan akar permasalahan di dalam konflik yang berbeda-beda. Terutama adanya pengaruh dari isu-isu yang justru beredar dimasyarakat luas tanpa adanya sumber yang

bisa dipercaya. Seharusnya hal tersebut berkaitan dengan komunikasi terutama antara pemerintah dengan pedagang. Jika saja pemerintah melakukan klarifikasi dan komunikasi dengan pedagang, bisa saja permasalahan yang datang karena isu-isu yang beredar tidak akan terjadi. Dari tahapan ini kita harus melihat bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan prasangka, stereotip, dan diskriminatif bisa terjadi. Isu-isu yang beredar dapat menjadi hal yang bisa saja memperkeruh konflik di luar permasalahan yang ada.

Pada tahapan ini dapat terlihat di dalam masyarakat adanya pandangan negatif yang selalu dilemparkan oleh pihak-pihak tertentu yang seakan-akan memburukkan suatu pihak dengan tujuan mendapatkan dukungan. Karena hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Simon Fisher bahwa kita perlu untuk mengubah pendekatan terhadap konflik serta mengidentifikasi dan mengurangi prasangka terhadap konflik. Dalam hal ini kita harus melihat konflik dengan aspek yang luas serta menempatkan diri sebagai pihak netral.

b. Meningkatkan Kesadaran dan Mobilisasi Untuk Mendukung Perubahan

Pertemuan dilakukan untuk mendukung adanya perubahan ini tidak pernah dilakukan dengan alasan pemerintah yang menyatakan bawah koordinasi yang berkaitan dengan pasar dan pedagang akan diwakilkan P4B. Pemerintah mengatakan bahwasanya pihak koordinasi tidak ingin bersatu dengan P4B karena ada indikasi kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya. Pemerintah tidak ingin melakukan mobilisasi dengan pedagang dari pihak perhimpunan karena menganggap pihak perhimpunan memiliki kepentingan sendiri sehingga pemerintah tidak ingin melakukan mobilisasi seperti pertemuan, komunikasi dua arah, dan sebagainya. Sedari awal pemerintah sudah menyatakan jika semua urusan yang berkaitan dengan pedagang maka akan diwakilkan oleh P4B. Sedangkan pihak perhimpunan tidak ingin bersatu dengan P4B dengan alasan-alasan yang ada. Hal-hal tersebut yang membuat pihak perhimpunan dan pemerintah kota tidak pernah menyelesaikan permasalahan ini.

Jika konflik benar-benar terjadi karena adanya tuntutan dan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak dan menginginkan adanya penyelesaian dan perdamaian didalamnya, maka tidak akan sulit untuk dilakukannya mobilisasi untuk melakukan perubahan terhadap konflik itu sendiri. Meningkatkan kesadaran serta melakukan mobilisasi untuk melakukan perubahan juga dapat dilakukan karena konflik yang sudah lama terjadi dan dianggap sudah alot. Ego masing-masing pihak berkonflik memang sangat penting di dalam proses penyelesaian konflik. Sekuat apapun pihak ketiga dalam membantu pengelolaan konflik dan penyelesaiannya jika pihak berkonflik masih kuat dengan pendapat danuntutannya serta tidak ada nya keinginan untuk menyelesaikan konflik, maka konflik akan terus terjadi walaupun dengan intensitas yang rendah.

c. Pencegahan

Dilihat dari segi konflik secara keseluruhan tanpa memandang dan menitikberatkan kepada suatu pihak saja, selama konflik ada beberapa pihak dan lembaga yang dijadikan pihak ketiga. Pedagang pernah mengadukan dan meminta bantuan seperti ke DPRD Kota sebagai lembaga terdekat. Pedagang juga mengadukan ke DPRD Provinsi, DPR, kementerian PUPR, Kemenkumham, Komnas HAM Provinsi maupun langsung ke pusat serta OBUDSMAN. Melihat dari intensitas pengaduan, maka DPRD Kota dan Komnas HAM lah menjadi pihak ketiga yang berperan cukup sering dalam mencoba membantu penyelesaian konflik. Jadi konflik lebih cenderung diselesaikan oleh pihak ketiga. Sedangkan dari pihak yang berkonflik, dari data yang didapat memang pencegahan hanya terjadi di antara pemerintah kota dengan pedagang dari pihak P4B, namun tidak dengan pihak perhimpunan.

d. Mempertahankan Kehadiran

Pada konflik antara pedagang pasar atas dan pemerintah kota Bukittinggi ini terlihat beberapa pihak yang diduga melakukan pemantauan selama konflik terjadi. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mencoba melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Pada konflik yang terjadi DPRD Kota Bukittinggi cukup sering menerima pengaduan baik secara formal maupun informal. Disini DPRD memang tidak bisa melakukan banyak namun hanya bisa mencoba untuk mempertemukan dan menjembatani antara pedagang dengan pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Komnas HAM, di mana mereka mencoba untuk memediasi kedua belah pihak agar bisa berkomunikasi dan membahas permasalahan yang ada secara terbuka

e. Memungkinkan Suatu Penyelesaian

Pihak ketiga di sini sudah mencoba untuk membantu mempertemukan kedua belah pihak agar membicarakan permasalahan ini, terbukti DPRD Kota Bukittinggi dan Komnas HAM sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan pemerintah serta pedagang. Yang menjadi permasalahan disini ternyata pemerintah tidak merasa memiliki permasalahan dengan pedagang dan sebagian besar pedagang juga mendukung pembangunan. Jika kita melihat dari sisi pedagang, pihak perhimpunan juga tidak mau duduk dan disatukan dengan pedagang lain. Sehingga hal-hal tersebut yang menghambat mereka untuk bisa bertemu dan membahas permasalahan di dalam pembangunan pasar ini.

Pembahasan Perpecahan Pedagang Dalam Konflik

Konflik di dalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi bukan konflik yang melibatkan pedagang secara keseluruhan. Pada konflik ini pedagang bisa dikatakan terbagi menjadi dua pihak dan ini tidak seperti konflik-konflik di dalam pembangunan pasar lainnya yang di mana seluruh pedagang memiliki suara yang bulat dan satu. Pada awalnya memang pedagang berada di bawah satu perkumpulan namun dipertengahan konflik pedagang terbagi dua dengan

kepentingan-kepentingan berbeda di dalamnya. Bermula dari awal munculnya konflik, di mana konflik muncul karena pedagang saat itu menuntut mengenai keputusan pemerintah mengenai tempat akan dibangunnya Tempat Penampungan Sementara (TPS). Saat itu pedagang masih berada dalam satu perwakilan yaitu P4B dengan Ketua Azwir Ibrahim namun P4B mendirikan Tim Koordinasi P4B dengan ketua Yulius Rustam, hal ini bertujuan agar kepentingan pedagang yang terdapat kebakaran akan diwakilkan dengan tim koordinasi yang dibentuk. Setelah pedagang menyetujui lokasi TPS yang telah dibahas bersama pemerintah, P4B kemudian membubarkan Tim Koordinasi P4B karena menganggap tim koordinasi ini sudah tidak sejalan dan memiliki kepentingan.

Saat setelah dibubarkan tim koordinasi tersebut mendirikan perkumpulan baru dengan nama Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi. Pada saat konflik meningkat terkait tuntutan pedagang mengenai mereka tidak diajak didalam perencanaan pembangunan dan saat perobohan bangunan tidak ada koordinasi dan pemberitahuan terhadap mereka.tuntutan tersebut datang dari Perhimpunan. Ternyata di lapangan P4B diikutsertakan dalam proses pembangunan, dan perwakilan P4B saat itu berada di lokasi saat perobohan bangunan bekas kebakaran.

4. KESIMPULAN

Berbicara mengenai konflik yang terjadi di dalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi pasca kebakaran, Dimulai dari awal pembangunan, di pertengahan pembangunan, bahkan sampai pasar diresmikan terdapat beberapa hal yang di antara pemerintah sebagai pihak yang membangun dan pedagang. Namun konflik di sini terlihat sedikit berbeda dengan konflik-konflik yang biasa terjadi di dalam pembangunan pasar.Bahwasanya konflik tidak datang dari pedagang secara keseluruhan.Dapat disimpulkan bahwa konflik memang bisa dijelaskan dengan alur ceritanya, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan konflik tidak selalu memiliki alur yang lurus, konflik tidak selalu memiliki satu alur, serta konflik tidak selalu stabil.Konflik bisa saja memiliki lebih dari satu alur dan bisa saja memiliki dinamika di dalam prosesnya. Dalam realita adanya perpecahan antara pedagang, adanya perbedaan alur konflik antara pemerintah kota dengan masing-masing pedagang. Dari hal tersebut cukup sulit untuk menjelaskan konflik secara detail, karena kembali lagi teori tahap konflik lebih cenderung menggiring peneliti untuk menceritakan konflik secara umum.Konflik yang terjadi antara pedagang pasar atas dengan pemerintah kota ini bukan hanya konflik yang dinamis dan memiliki satu alur saja. Konflik ini muncul dari duabelah pihak pedagang yang memiliki tuntutan berbeda.Konflik ini juga memiliki intensitas yang naik turun mulai dari awal mula terjadinya konflik sampai akhir dari perjalanan konflik, sehingga konflik ini memiliki dinamika yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Afrizal. 2014. *“Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”*. Rajawali Pers.
- Bagus Brata Ida. PASAR TRADISIONAL DI TENGAH ARUS BUDAYA GLOBAL. Jurnal. <https://media.neliti.com/media/publications/102449-ID-pasar-tradisional-di-tengah-arus-budaya.pdf>
- Budiarjo, Miriam. 2013. *“Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Politik”*. Penerbit: PT Gramedia. Jakarta.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Didik Baehaqi Arif. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012 Bahan Ajar. Hak Asasi Manusia.
- Edmun Burke, Seech to The Electorof Bristol. Chicago University. Pdf. <http://presspubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.htm>.
- Fisher, Simon. dkk. 2001. *“Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak”*. Jakarta: The British Council.
- Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens, The Paradoxes of Contemporary of Democracy. Formal Participatory, and Social Dimensions. Comparative Politics, Vol. 29. No. 3. April, 2005.
- Irianto Heru dan Bungin Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwandi, Endah R. Chotim. ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Jurnal. 2017
- Moleong, Lexy J. 1998. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muspawi, Mohamad. MANAJEMEN KONFLIK (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). Jurnal. 2014 <https://media.neliti.com/media/publications/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi.pdf>
- Nasution, Adnan Buyung dan Patra M. Zen. 2006. *“Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia”*. Yayasan Obor Indonesia. Pdf. <http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf>.
- Sukri. Keniscayaan Konflik dalam Masyarakat Demokrasi. Jurnal.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis 2015. *“Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”*. Penerbit: PT Gramedia. Jakarta
- Winardi. 2007. *“Manajemen Konflik, (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)”*. Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-2, Jilid 2.
- Wirawan. 2010. *“Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian”*. Jakarta: Salemba Humanika.